

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	PJ Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Informasi tentang Profil Badan Publik						
a	Kedudukan/domisili beserta alamat	Alamat, nomor kontak, alamat email	Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	bappeda.magelangkota.go.id
b	Visi dan Misi Kota		Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	bappeda.magelangkota.go.id
c	Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	SOTK, Kepala s/d Fungsional Tertentu	Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	bappeda.magelangkota.go.id
2	Ringkasan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020						
a	Nama Program dan Kegiatan	9 Program, 51 kegiatan	Sekretaris	2019	CETAK	Selama Berlaku	
b	Penilaian Kinerja	Hasil 2019 : B	Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	bappeda.magelangkota.go.id
c	RENJA Bappeda TA 2020			2019	CETAK	Selama Berlaku	
3	Kinerja Kinerja						
a	Capaian Kinerja	Target & Realisasi Kinerja Fisik & Keuangan	Sekretaris	2019	CETAK	Selama Berlaku	
4	Informasi Keuangan						
a	Perda APBD TA 2020	DPA BAPPEDA TA 2020	Sekretaris	2019	CETAK	Selama Berlaku	
5	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa						
a	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Paket pengadaan, kode, nama paket, tahun anggaran	Sekretaris	2019	ONLINE	Selama Berlaku	sirup.lkpp.go.id

B. INFORMASI SETIAP SAAT

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020

No	Informasi	Dasar Hukum	Kensekuensi		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata PNS terkait data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Th.2008 tentang KIP pasal 17 huruf h - UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d 	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi, dan rawan untuk disalahgunakan	Rahasia Pegawai terjaga	Tanpa batas
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i - UU No.15 Tahun 2004 pasal 19 - UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9 	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Tidak terbatas/kecuali bila ada permohonan instansi terkait
3	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.15 Tahun 2004 pasal 19 - UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 7 - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 9 	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia pihak terperiksa terjaga	Setelah LHP diserahkan ke DPRD
4	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l dan huruf j tentang Pengadaan Barang/Jasa	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai
5	Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l - UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Memberikan kepastian atas proses kerjasama	Setelah proses tindak lanjut audit BPK